



Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam

Apriani Sri Mulyani¹, Achmad Maftuh Sujana², Rani Wulandari³, Ade Ika Ahadiyah⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email Korespondensi: srimumlyaniapriani@gmail.com, achmad.maftuh@uinbanten.ac.id,
wulandarirani02576@gmail.com, ikaade384@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Humans are inherently born leaders, ever since the Prophet Adam was created as a caliph, tasked with taking care of the earth. The word "caliph" itself can be interpreted as a liaison or leader who conveys and directs something. As a leader, expertise is required in managing the behavior of others in their work through the use of power. A leader has the right to direct, mobilize, and influence those under his command to carry out the commands that must be carried out to achieve a desired goal. Therefore, a leader must possess good leadership skills to achieve harmony within the leadership and achieve the outlined goals. In relation to this leadership, Islam began its leadership with the sending of Muhammad (peace be upon him) as a prophet and messenger to invite humanity to the truth and embrace Islam as a faith. During the struggle and spread of Islam, the Prophet Muhammad automatically became the leader of the Muslims until the end of his life. After the Prophet Muhammad's death, Muslims were filled with deep sorrow. They lost a beloved leader, one with a unique and complex personality, broad insight, and a trustworthy character.

Keywords: Leadership, Abu Bakr Al-Siddiq, Omar Ibn Al-Khattab

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia dilahirkan sebagai pemimpin, semenjak Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah untuk ditugaskan mengurus bumi, kata khalifah itu sendiri dapat diartikan sebagai penghubung atau pemimpin untuk menyampaikan memimpin sesuatu. Sebagai pemimpin dituntut keahliannya dalam mengatur perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Pemimpin mempunyai hak kekuasaan untuk mengarahkan, mengerahkan, dan mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk melaksanakan titah-titah yang harus dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan seni memimpin yang baik, sehingga akan tercapai keselarasan dalam sebuah kepemimpinan, dan tercapai pula tujuan-tujuan yang telah digariskan. Berkaitan dengan kepemimpinan ini, Islam memulai sebuah kepemimpinannya dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul untuk mengajak manusia ke arah kebenaran, memeluk Islam sebagai suatu keyakinan. Dalam perjalanan perjuangan dan penyebaran Islam, nabi Muhammad secara otomatis sebagai pemimpin kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin dirundung kesedihan yang mendalam, mereka kehilangan sosok pemimpin yang dicintai, sosok pemimpin yang mempunyai kepribadian yang unik dan kompleks, berwawasan luas, dan bersifat amanah.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Abu Bakar Al-Shiddiq, Omar Ibn Al-Khattab

PENDAHULUAN

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi situasi krusial yang menentukan arah masa depan kepemimpinan mereka. Wafatnya Rasul bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi kaum muslimin, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai siapa yang berhak menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin umat. Dalam konteks ini, para sahabat besar segera menyadari bahwa keberlanjutan kepemimpinan adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas umat, menghindari perpecahan, dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap berjalan dengan baik. Situasi genting ini akhirnya mendorong kaum muslimin untuk berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang menjadi lokasi pertemuan penting antara kaum Anshar dan Muhajirin untuk melakukan musyawarah politik pertama dalam sejarah Islam pasca-wafatnya Rasulullah.

Dalam pertemuan tersebut, muncul beberapa pandangan tentang siapa yang paling layak memegang tampuk kepemimpinan. Kaum Anshar merasa memiliki hak karena selama ini mereka menjadi kelompok pendukung utama yang memberikan perlindungan bagi Nabi dan para Muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Di sisi lain, kaum Muhajirin juga menganggap diri mereka berhak memimpin karena mereka merupakan kelompok pertama yang memeluk Islam, mendampingi Nabi dalam dakwah sejak awal, serta memiliki kedudukan sosial dan spiritual yang tinggi dalam komunitas muslim. Perbedaan pendapat tersebut memunculkan dinamika dan tensi yang cukup besar, dan apabila tidak diselesaikan dengan bijaksana berpotensi menimbulkan perpecahan umat di masa yang sangat sensitif itu.

Dalam suasana yang penuh ketegangan tersebut, tampil peran besar tiga sahabat utama: Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar dengan kebijaksanaannya mengingatkan umat Islam bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang paling dekat dengan Rasul dan paling memahami agama. Umar bin Khattab kemudian memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa Abu Bakar merupakan orang yang selalu menjadi pendamping setia Nabi dalam setiap perjalanan, termasuk saat hijrah, serta orang yang pertama kali menjadi imam pengganti Nabi ketika beliau sakit. Diplomasi halus dan argumentasi rasional yang disampaikan oleh Umar dan Abu Ubaidah membuat suasana memanas itu menjadi lebih tenang. Pada momen tersebut, Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar sebagai bentuk deklarasi baiat, diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian disusul oleh kaum Muhajirin dan Anshar lainnya.

Proses ini menunjukkan bagaimana para sahabat menyelesaikan persoalan besar dengan pendekatan musyawarah (syūrā), ijtihad, serta semangat ukhuwwah yang tinggi. Mengingat kondisi umat yang baru saja ditinggalkan pemimpinnya, kemampuan para sahabat untuk mengedepankan persatuan di atas kepentingan golongan merupakan bukti kedewasaan politik mereka. Namun dalam catatan sejarah juga disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak hadir pada baiat awal tersebut karena sedang mendampingi jenazah Rasulullah SAW bersama keluarga

beliau. Ali baru menyatakan baiatnya enam bulan kemudian, setelah kondisi umat stabil dan setelah beliau melihat kebutuhan untuk menjaga kesatuan umat Islam lebih besar dibanding mempertahankan pendapat politik pribadi. Perbedaan waktu baiat ini menjadi salah satu titik awal pembahasan panjang dalam sejarah politik Islam, tetapi mayoritas ulama menilai bahwa perbedaan itu tidak menggugurkan komitmen Ali terhadap persatuan umat.

Pembaiatan Abu Bakar secara umum yang dilakukan keesokan harinya di Masjid Nabawi menjadi simbol legitimasi publik yang menyatukan seluruh komponen masyarakat muslim. Keputusan ini menjadi fondasi awal terbentuknya institusi khilafah dalam Islam dan menjadi preseden penting dalam sejarah pemerintahan muslim. Peristiwa Saqifah tidak hanya menjadi momen politik pertama umat Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa diskursus politik dalam Islam sejak awal telah didasarkan pada musyawarah, argumentasi, kepentingan umum, dan persatuan umat. Oleh karena itu, peristiwa ini memiliki makna historis, sosiologis, dan teologis yang sangat besar dalam pembentukan tradisi politik Islam selanjutnya (Faisal, Mukti, & Dahlan, 2022).

METODE

Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah literature review. Penelitian ini memakai pendekatan tinjauan literatur untuk mengumpulkan data dan menganalisis pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin. dalam pendekatan ini, penulis mempelajari berbagai artikel, buku, dan sumber-sumber utama yang relevan dengan topik yang dibahas, mirip karya-karya sejarah, tafsir, serta literatur ilmiah yang mengupas aspek politik Islam pada masa khalifah pertama. dengan memanfaatkan kajian-kajian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menerima pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik yang terjadi pada masa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Islam Setelah Wafatnya Rasulullah SAW

Wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 M (11 H) menjadi titik krusial dalam sejarah Islam. Umat Islam tiba-tiba dihadapkan pada kekosongan kepemimpinan, baik sebagai pemimpin agama maupun kepala negara. Sejak awal, umat Islam telah dijanjikan dalam Al-Qur'an sebagai khayra ummah komunitas terbaik yang memiliki peran strategis dalam membawa perubahan bagi masyarakat global. Janji tersebut memberikan dorongan teologis dan sosiologis kepada kaum muslimin untuk menjaga kelangsungan kepemimpinan Islam. Namun demikian, fakta sejarah menunjukkan adanya keragaman sudut pandang dalam memahami peristiwa politik pasca-wafatnya Rasulullah. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman, latar sosial, dan teori-teori politik yang berkembang di kalangan sahabat. Lebih-lebih, sejarah Islam pada masa awal sangat erat kaitannya dengan dinamika politik dan kekuasaan, sehingga muncul berbagai kepentingan kelompok maupun individu di dalamnya (Ely Zainuddin, 2015).

Ketiadaan wasiat atau penunjukan langsung dari Rasulullah SAW mengenai siapa yang menjadi penggantinya membuat para sahabat harus melakukan ijtihad

politik. Umat Islam menyadari pentingnya segera memilih pemimpin untuk mempertahankan stabilitas agama, persatuan sosial, dan keberlanjutan negara Madinah yang baru tumbuh. Kaum Anshar dan Muhajirin, sebagai dua kelompok utama dalam masyarakat Islam, memiliki kontribusi besar dalam perjuangan dakwah sehingga masing-masing merasa layak mengajukan calon pemimpin. Kaum Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, dan mengusulkan agar kepemimpinan dibagi dua: "Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin." Mereka menekankan bahwa keberhasilan dakwah di Madinah tidak mungkin terjadi tanpa dukungan mereka. Para Muhajirin segera datang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk mencegah perpecahan bangsa yang baru terbentuk.

Dalam suasana diskusi yang memanas, Abu Bakar mengambil peran diplomatis dengan menyampaikan argumentasi yang menyejukkan. Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan Quraisy memiliki legitimasi sosial di Jazirah Arab sebuah faktor penting untuk menjaga stabilitas politik. Abu Bakar bahkan menawarkan dua calon selain dirinya yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, untuk menunjukkan bahwa ia tidak mengejar kepentingan pribadi. Argumentasi ini mempengaruhi banyak pihak; namun, sebelum Umar dan Abu Ubaidah mengangkat baiat, Basyir bin Sa'ad dari kalangan Anshar terlebih dahulu mengucapkan baiat kepada Abu Bakar. Langkah ini disusul oleh tokoh-tokoh Anshar dan Muhajirin lainnya, sehingga terjadilah baiat khusus (bai'at khassah) di Saqifah Bani Sa'idah (Hermanto, 2014).

Keesokan harinya, diadakan baiat umum (bai'at 'ammah) di Masjid Nabawi yang diikuti oleh para sahabat besar, termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan lainnya (Purwanto, 2024). Dengan demikian, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Proses pemilihan yang penuh ijtihad, musyawarah, dan diplomasi ini menggambarkan kedewasaan politik para sahabat dalam mengutamakan persatuan umat di tengah potensi konflik besar pasca-wafatnya Rasulullah.

Peran Abu Bakar dalam Membangun Stabilitas Politik

Abu Bakar ash-Shiddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah, yang terkenal dengan gelar ash-Shiddiq karena menjadi orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj ketika banyak orang meragukannya. Latar belakangnya sebagai sahabat terdekat Rasulullah SAW menjadikan dirinya sosok yang memiliki kredibilitas tinggi di mata umat Islam. Abu Bakar dikenal sangat dermawan, rendah hati, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Beliau pernah membebaskan banyak budak yang disiksa karena memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Seluruh hartanya pernah ia serahkan untuk perjuangan Islam, menunjukkan komitmen total terhadap agama dan umat (Tumangger, 2021). Karakter inilah yang menjadikan Abu Bakar sosok yang tepat untuk memimpin umat Islam di masa krisis.

Kebijakan Politik Abu Bakar sebagai Khalifah

Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar baik dari dalam maupun luar negeri. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif semuanya berada di tangan khalifah, karena struktur negara Islam masih sangat sederhana. Stabilitas politik pada masa awal ini sangat rapuh karena perpecahan dan konflik suku di Jazirah Arab masih mudah muncul kembali.

1. Pengiriman Pasukan Usamah bin Zaid

Sebelum wafat, Rasulullah telah memerintahkan pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid untuk berangkat ke Syam. Namun sebagian sahabat mengusulkan agar misi ini dibatalkan demi menjaga stabilitas internal. Abu Bakar menolak usulan itu dan tetap memberangkatkan pasukan karena menganggapnya sebagai amanah Rasul. Keputusan ini memperlihatkan ketegasan Abu Bakar dan menegaskan konsistensi negara Islam dalam menepati janji politik dan militernya.

2. Pemberantasan Penolak Zakat

Salah satu persoalan besar adalah banyaknya suku yang enggan membayar zakat setelah Rasulullah wafat. Mereka menganggap zakat hanya kewajiban kepada Rasul, bukan kepada negara. Abu Bakar bersikeras memerangi kelompok ini karena memutuskan zakat berarti memutuskan pilar ekonomi Islam. Ketegasan Abu Bakar menjaga integritas agama dan negara.

3. Perlawanan Terhadap Nabi Palsu

Beberapa orang mengaku nabi, seperti Musailamah al-Kazzab, Al-Aswad al-Ansi, Sajah binti al-Harits, dan Tulaihah al-Asadi. Fenomena ini mengancam stabilitas aqidah dan politik. Melalui strategi militer yang dipimpin Khalid bin Walid, gerakan ini berhasil dipadamkan dan stabilitas kembali terjaga.

4. Perang Riddah (Apostasi)

Perang ini terjadi karena munculnya suku-suku yang kembali murtad setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar memerangi mereka demi mempertahankan persatuan dan eksistensi negara Islam. Perang Riddah menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan umat.

5. Perang Yamamah

Di Yamamah, pasukan Islam menghadapi Musailamah al-Kazzab. Pertempuran ini sangat besar dan mengakibatkan gugurnya lebih dari 70 penghafal Al-Qur'an. Kemenangan ini memulihkan kembali wilayah-wilayah yang memberontak.

6. Penaklukan Eksternal

Setelah stabilitas dalam negeri terjaga, Abu Bakar memulai ekspansi ke wilayah kekaisaran Romawi dan Persia. Dalam waktu singkat, pasukan Islam berhasil menguasai beberapa wilayah penting, menunjukkan kemampuan Abu Bakar dalam diplomasi dan strategi militer.

7. Pengumpulan Al-Qur'an

Gugurnya banyak penghafal Al-Qur'an pada Perang Yamamah membuat Umar bin Khattab mendorong pengumpulan mushaf agar tidak hilang. Abu Bakar membentuk panitia yang dipimpin Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan dan

membukukan Al-Qur'an. Keputusan ini menjadi salah satu warisan terbesar Abu Bakar yang menjaga keaslian Al-Qur'an hingga kini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai dinamika politik setelah wafatnya Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa masa tersebut merupakan periode krisis yang menuntut kedewasaan politik umat Islam. Ketidadaan wasiat mengenai pengganti Nabi menyebabkan munculnya perbedaan pendapat antara kelompok Anshar dan Muhajirin mengenai siapa yang paling layak memimpin umat. Diskusi panjang dan tensi di Saqifah Bani Sa'idah menunjukkan bahwa umat berada pada batas perpecahan yang berbahaya. Namun, melalui musyawarah, diplomasi, dan kebijaksanaan tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, umat Islam berhasil menentukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Proses bai'at khusus di Saqifah dan bai'at umum di Masjid Nabawi menandai awal terbentuknya institusi khilafah serta menunjukkan bahwa persatuan dan kepentingan umat jauh lebih utama daripada ambisi politik kelompok tertentu. Peristiwa ini menjadi fondasi penting dalam sejarah peradaban Islam karena memperlihatkan mekanisme ijtihad politik yang mengutamakan ukhuwah dan stabilitas umat. Peran Abu Bakar ash-Shiddiq selanjutnya terbukti sangat signifikan dalam menegakkan stabilitas politik dan agama Islam. Pada masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai tantangan besar seperti penolakan zakat, gerakan nabi palsu, pemberontakan murtad (Perang Riddah), serta ekspansi asing dari Romawi dan Persia. Dengan ketegasan, keimanan kuat, dan kecerdasannya, Abu Bakar mampu mengatasi seluruh ancaman tersebut sehingga keutuhan negara Islam tetap terjaga. Kebijakan strategis seperti memberangkatkan pasukan Usamah, memerangi kelompok pembangkang zakat, menumpas pemberontak Yamamah, hingga memprakarsai pengumpulan Al-Qur'an menjadi warisan monumental yang menjaga kemurnian ajaran Islam hingga kini. Keberhasilan Abu Bakar tidak hanya menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai tokoh spiritual yang memahami urgensi persatuan umat. Kepemimpinannya menjadi teladan bahwa stabilitas negara hanya dapat terwujud apabila dipandu oleh keimanan, ketegasan, dan komitmen total terhadap kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rahman, M. A. (2022). Kontribusi Abu Bakar dalam pembentukan pemerintahan Islam. *Jurnal Studi Islam dan Politik*, 4(2), 78–89.
- Ahmad Yani. (2022). Khulafah al-Rasyidun: Menelaah kepemimpinan Abu Bakar al-Shiddiq. *Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 5(1), 45–60.
- Al Fajri, M., Kartika, M., & Supriyanto, S. (2023). Peradaban Islam pada masa Abu Bakar as-Siddiq. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 6(2), 123–134.
- Al-Fauzan, M. (2024). Peran Abu Bakar dalam mempersatukan umat Islam. *Jurnal Peradaban Islam Kontemporer*, 9(1), 55–67.

- Bakar, I. A. (2008). Sejarah peradaban Islam. Retrieved from <https://repository.uin-malang.ac.id>
- Ely Zainudin. (2015). Peradaban Islam pada masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Intelegensia*, 3(1), 50-58. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>
- Faisal, F., Mukti, A., & Dahlan, Z. (2022). Perspektif sosial dan politik terhadap kebangkitan pembangunan ekonomi melalui kepemimpinan Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar ibn al-Khattab. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8(3), 171-175.
- Fajri, A., Kartika, M., & Supriyanto, S. (2023). Peradaban Islam pada masa Abu Bakar as-Siddiq. *Jurnal Penerbit Daarul Huda*, 7(1), 65-75. Retrieved from <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id>
- Hasan, Z. (2019). Kebijakan sosial dan politik pada masa Abu Bakar as-Siddiq. *Jurnal Ilmu Keislaman dan Peradaban*, 3(1), 45-53.
- Ismail, A., & Zaini, H. (2021). Kajian militer pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. *Jurnal Kajian Sejarah Islam*, 7(1), 12-20.
- Nasution, S. (2020). Administrasi pemerintahan Islam masa Khalifah Abu Bakar. *Jurnal Sejarah Islam*, 8(2), 15-28.
- Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq dalam perspektif sejarah Islam. (2022). *Jurnal Ilmu Keislaman*, 12(1), 21-35.
- Purwanto, A. (2024). Kebijakan strategis Abu Bakar ash-Shiddiq pada masa Khalifah Rasyidah. *Khozinatul Ulum: Jurnal Islam dan Manajemen*, 2(2), 56-67.
- Purwanto, A. (2024). Kebijakan strategis Abu Bakar ash-Shiddiq pada masa Khalifah Rasyidah. *Global Education Journal*, 2(2), 111-122.
- Refliani, S., & Lestari, S. I. (2024). Kebijakan fiskal zaman Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 75-88.
- Rifai, M. A. (2023). Strategi diplomasi pada era Abu Bakar as-Siddiq. *Jurnal Diplomasi dan Hubungan Internasional Islam*, 5(3), 33-45.
- Roselani, N., Lubis, M. R., & Azhari, S. (2023). Peradaban Islam masa Khalifah Rasyidin. *Journal on Education*, 9(3), 112-125.
- Sulistio, E., Purnomo, A., & Setiabudi, D. I. (2022). Analisis sejarah peradaban Islam masa Khulafaurasyidin. *Jurnal Anfa*, 4(2), 43-58. <https://jurnal.anfa.co.id>
- Tumangger, M. (2021). Pemerintahan Abu Bakar. *At-Tafkir*, 3(1), 55-77.
- Zulfia Rifda, & Dzulkifli, I. H. (2023). 7482-article text-24512-1-10-20231228, 2(2), 131-148.